



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LINDRA AZMAR
2. Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. NIK : 514697

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 870.375.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/36 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah Seluas 1544 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 501.800.000
3. Tanah Seluas 611 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 198.575.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA NF125 SLD SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1CB/SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.975.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 61.135.174

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 971.485.174

III. HUTANG Rp. 60.287.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 911.197.674

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.